

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2014, *"Pelajaran Hukum Pidana bagian I"*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- H. Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008).
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn): Makassar.
- Namira W., Nur Azisa., dan S.S.R. Parawansa, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*. Jogjakarta : Karya Bakti Makmur Indonesia. Hlm. 2
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group.
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*. Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta: Jakarta.
- Syamsudin Haris, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Uu Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia.

Jurnal

- Andriani, dan Feri Amsari, F. 2021. Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>

Dede Sri Kartini, 2017, *Demokrasi dan Pengawasan Pemilu*, Journal of Governance, Volume 2 Nomor 2

Faldi Priya, *et.al.*, 2021, *Analisis Kajian Hukum Dan Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum Hermenutika, Volume 5 Nomor 1.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Kharisma Putra Utama Offset, Depok, hlm. 3.

Julita Widya Dwintari, 2021, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP UNJA), Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 5 Nomor 1

Mugi Riskiana Halalia, 2017, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 8 Nomor 2.

Nanik Prasetyoningsih, 2017, *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul Yogyakarta, Volume 21 Nomor 2.

Website

<https://fahum.umsu.ac.id/badan-ad-hoc-pemilu-pengertian-beserta-tugasnya/>
diakses pada tanggal 23 september 2024, Pukul 17.00 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-pemilih-dalam-pemilu-lt65ae134e2aa58/> di akses pada tanggal 22 September, Pukul 19.35 WITA

Skripsi / Tesis

Ariawan Nursa, 2019, *Peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Debby, 2018, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*, Thesis, Universitas AtmaJaya, Yogyakarta.

Milhan Hasibuan. 2024. *Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Muhammad Khoirul Iqbal, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Rahalim Raja Muda Harahap, 2022, *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Peln Cabang Lhokseumawe)*, Thesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Riczi Bayu Andika Rachman, 2020, *Peran Pemberdayaan Perempuan Difabel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negere (IAIN) Kediri.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 391)